Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Polresta Padang Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Fahmi Pramulya¹, Syafridatati, S.H., M.H¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: fahmipramulya33@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

ABSTRACT

One of the most recent examples of juvenile crime cases was the arrest of 5 teenagers for their acts of violent theft (Begal). but the five adolescents are still minors. Formulation of the problem: (1) How is the implementation of diversion by investigators at the Padang Police? (2) What were the obstacles that investigators encountered in implementing diversion? In this study, sociological juridical research type whose data sources came from primary data and secondary. (1) diversion has been carried (2) Obstacles of diversion are the absence of further action from the victim to the police after the incident

Key words : Diversion, Investigator, Restorative Justice, Children.

1. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) Hukuman penjara malah membuat anak lebih profesional dalam melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena kondisi atau suasana didalam penjara yang berbeda dengan suasana yang seharusnya didapatkan oleh anak untuk proses tumbuh kembangnya. Didalam penjara justru anak akan belajar banyak hal yang tidak baik bagi psikologinya, dimana akan membuat anak mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran yang seharusnya tidak sesuai dengan umurnya dengan kata lain hal-hal yang didapatkan didalam penjara sebenarnya belum sepatasnya untuk diterima oleh anak. Karna

tentu saja berdasarkan kejiwaan anak yang belum siap menerima akan hal itu.

Kejahatan tindak pidana anak semakin hari semakin meningkat, bahkan masalah ini sudah sangat sulit diatasi. Salah satu contoh kasus tindak pidana anak terbaru yaitu tertangkapnya 5 orang remaja karena aksinya yang melakukan pencurian dengan kekerasan (Begal). masing-masing remaja berinisial AA (15),IE (16) WF (16) RP (17) dan GH (15), namun kelima remaja itu masih anak dibawah umur. Dengan begitu kelima remaja tersebut sudah melanggar pasal 365 KUHP mengenai tindak pidana pencurian. Adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan agar terwujudnya pelaksanaan diversi akan diuraikan dalam pembahasan yang akan dikaji, maka dari itu hal-hal yang melatar belakangi penulis untuk

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul skripsi “ **PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**”.

A. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepada anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Padang?
- 2) Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi di Polresta Padang?

B. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk dapat mengetahui pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Padang
- 2). Untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer
- 2) Data Sekunder

c. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi Dokumen
- c. Analisis Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversifikasi oleh Penyidik Polresta Padang terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan diversifikasi penyidik memeriksa anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 18 tahun dengan menggunakan metode suasana kekeluargaan dengan tidak menggunakan seragam polisi atau penyidik dan juga dalam proses pelaksanaannya penyidik harus melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, hal ini bertujuan agar anak pelaku tindak pidana bisa memberikan keterangan tanpa merasa dirinya terancam dengan aparat kepolisian/penyidik yang menggunakan seragam. pada waktu pemeriksaan penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak membuat takut si tersangka anak, dengan menggunakan metode kekeluargaan ini juga berarti tidak adanya pemaksaan, intimidasi atau hal yang sejenisnya dalam penyidikan. Pemeriksaan pada pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan juga dilaksanakan dalam waktu yang singkat yaitu selama satu hari.¹

Anak-anak melakukan tindakan yang merupakan cerminan dari apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka lakukan meniru apa yang mereka lihat. Terlepas dari kepribadian setiap orang, setiap tindakan yang

¹ Hasil Wawancara dengan Briptu Chindanita, selaku penyidik di Polresta Padang pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021, Pukul. 10.00. WIB

dilakukan seorang anak merupakan perwujudan dari proses peniruan. Dalam proses penyidikan, penyidik Polresta Padang tidak perlu melakukan pemeriksaan di Polresta, namun bisa melakukan pemeriksaan dimanapun melalui pendekatan restoratif justice atau dengan cara tertentu.

B. Kendala yang Ditemui Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi di Polresta Padang

Pada dasarnya kendala-kendala yang sering kali ditemui adalah tidak maunya para pihak untuk berdamai, karena persepsi masyarakat yang berfikir bahwa suatu tindak pidana selayaknya memang harus dihukum dan diberikan sanksi tegas tanpa memperhatikan hak-hak yang semestinya harus dilindungi. Banyaknya masyarakat yang memiliki mindset pemikiran pembalasan terhadap suatu kesalahan sehingga adapun upaya-upaya yang seharusnya itu penting diabaikan.

Di dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa orang tua juga menjadi faktor penghalang bagi terlaksananya upaya diversi dengan baik, lebih khususnya bagi keluarga korban yang tidak mau untuk berdamai karena menganggap bahwa pelaku memang seharusnya dihukum. Di sini dapat kita ketahui bahwa faktor penting dalam terlaksananya diversi adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun begitu hal tersebut akan sangat sulit terwujud

dikarenakan sifat dasar manusia yang sulit memaafkan.

4.SIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan yang sesuai dengan undang-undang, anak-anak yang melakukan tindak pidana di Polresta Padang telah di proses Proses diversi itu sudah dilakukan Polresta Padang dengan benar, dan Polresta Padang banyak menangani kasus diversi..
2. kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan LSM. Masyarakat yang masih terlalu asing dengan upaya diversi sehingga seringkali mengabaikan upaya tersebut dan lebih mengutamakan pembalasan dari pada memperhatikan kepentingan anak.

5.REFERENSI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan
Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12
(Dua Belas) Tahun.

Hasil Wawancara dengan Briptu
Chindanita, selaku penyidik di Polresta Padang
pada hari Rabu Tanggal 13 Januari 2021,
Pukul. 10.00. WIB